

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan topik yang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan, khususnya oleh orang-orang atau pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, permasalahan mengenai pendidikan seharusnya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang senantiasa mengatur berbagai regulasi yang digulirkan. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam peningkatan taraf hidup suatu bangsa, disamping pemenuhan kesehatan dan tingkat daya beli masyarakat.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (*UU RI No 20 tahun 2003 tentang SPN*).

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa yang telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“...setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai sektor termasuk pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang telah digulirkan saat ini adalah perubahan manajemen negara, yaitu berubahnya manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah* yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi*.

Otonomi daerah membawa perubahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk memberikan kebebasan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Walau keberadaan pendidikan telah berkembang dari masa ke masa, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan merupakan suatu hal terpenting bagi pembangunan

dalam rangka meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Salah satu permasalahan pendidikan yang sering diperbincangkan yaitu mengenai masih rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

Pemerintah telah banyak melakukan program-program sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya diluncurkannya program sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru, menaikkan dan menetapkan batas minimal kelulusan setiap tahun dengan tujuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan global, memberikan bantuan operasional sekolah sebagai upaya untuk membantu operasional sekolah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat satuan pendidikan akan meningkat, karena dalam desentralisasi satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengelola pendidikan yang diselenggarakannya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta dapat memberikan kepuasan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat pengguna pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah usaha untuk mempersiapkan manusia yang siap pakai dalam berbagai bidang pekerjaan dan keahlian guna menjawab tantangan kehidupan. Pendidikan harus mampu membina peserta didik menjadi manusia dengan karakter yang kuat, dengan jati diri yang jelas dan dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa, baik masalah-masalah masa kini maupun di masa yang akan datang.

Penyelenggaraan pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping

memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik seperti yang tercantum dalam *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003* bahwa satuan pendidikan diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu:

“...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Secara harfiah makna yang terkandung dalam tujuan tersebut adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pendidikan yang berkualitas pula, yang mampu merealisasikan harapan tersebut secara nyata.

Pendidikan secara operasional menjadi tanggung jawab bersama antara orangtua sebagai pelaksana informal, masyarakat sebagai pelaksana non formal dan sekolah sebagai pelaksana formal. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan nama tri pusat pendidikan.

Sampai saat ini program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan belum memberikan hasil yang memuaskan, banyak cara yang sudah dilaksanakan namun sampai saat ini, semua upaya tersebut belum memperlihatkan hasil menggembirakan karena hasil yang dicapai belum maksimal.

Keadaan ini hendaknya menjadi bahan bagi penyelenggara satuan pendidikan dalam mengembangkan kualitas sekolah sehingga sekolah mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan pendidikan yang dalam perkembangannya terus meningkat. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pendidikan ditandai dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap satuan pendidikan yang mampu memberikan layanan pendidikan secara maksimal sehingga kondisi ini menuntut

satuan pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan berkompetisi. Pesatnya arus informasi memungkinkan masyarakat dapat selektif dalam memilih satuan pendidikan atau lembaga pendidikan untuk anak-anak mereka.

Pemikiran ini mendasari pemerintah untuk mendorong munculnya terobosan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai upaya menjawab harapan masyarakat dan pengguna pendidikan lainnya. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai wujud reformasi dalam dunia pendidikan, dengan memberikan otoritas kepada sekolah untuk dapat mengelola dengan memberdayakan semua unsur yang terkait termasuk masyarakat didalamnya.

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholder*). (Chapman, 1990)

Menurut Tim Pokja *School Based Management* Dinas Pendidikan Jawa Barat (2002: 4), manajemen berbasis sekolah yaitu:

“Model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota”.

Manajemen berbasis sekolah memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah untuk dapat mengatur pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua pihak terkait termasuk masyarakat untuk dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu. Disamping itu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan terus dikembangkan dan salah-satunya yaitu digulirkannya *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang secara langsung dapat menjadi penunjang terlaksananya manajemen pendidikan yang berkualitas sehingga dapat menciptakan generasi yang memiliki kualifikasi seperti apa yang diharapkan yaitu mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain dan secara aktif berperan mengatasi dampak negatif dari era globalisasi.

Sebagai suatu lembaga pendidikan, sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan layanan belajar dan lulusan yang bermutu sesuai standar yang dipersyaratkan serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menggambarkan keseluruhan pihak sekolah dalam lingkup manajemen sekolah amat penting, karena manajemen sekolah merupakan suatu aktivitas yang sifatnya kolaboratif artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama profesional melibatkan semua personil sekolah, bukan bersifat individual.

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas, diperlukan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Tanpa adanya manajemen sekolah yang baik maka kemungkinan keberhasilan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tidak akan berhasil.

Purwanto dan Djojopranoto (198: 14) mengemukakan bahwa:

“Manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.”

Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi tinggi serta harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai suatu penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran (Rohiat, 2008).

Engkoswara (1987: 42) mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen pendidikan yaitu:

“Manajemen pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya yaitu sumber daya manusia,

kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan yang disepakati. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu efektif dan efisien.”

Fungsi manajemen sebagai suatu karakteristik pendidikan muncul dari kebutuhan untuk memberikan arah pada perkembangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam operasional sekolah.

Standar pelayanan pendidikan merupakan bentuk operasional dari manajemen sekolah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar pelayanan pendidikan di sekolah dapat menjadi kunci terbentuknya pendidikan yang sesuai dengan harapan seluruh stakeholder pendidikan termasuk masyarakat pengguna pendidikan. Standar pelayanan pendidikan berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan secara efektif dan efisiensi sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Keberadaan sekolah unggulan mampu memberikan jawaban terhadap keadaan tersebut. Sekolah unggulan menjadi dambaan para stakeholder pendidikan dalam rangka menciptakan lulusan yang mampu menjawab tantangan dunia global, karena sekolah unggulan memiliki mutu yang disyaratkan disamping mutu lokal yang dikembangkan secara internal yang secara nyata dapat menunjang keberlangsungan proses pendidikan, yakni pencapaian tujuan pendidikan.

Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. (Depdikbud, 1994: 3). Selanjutnya menurut Nurkolis (1996: 12) bahwa “ Konsep sekolah unggulan memfokuskan pada adanya peningkatan kinerja secara terus menerus dan

menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh”. Berrarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuhkembangkan melainkan potensi psikis, fisik, etik, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi. Sedangkan menurut Hasan (1996: 35) mengatakan bahwa: “Sekolah unggulan dapat diartikan sekolah yang mengolah suatu proses pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia unggul”.

Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. (Depdikbud, 1994: 3). Selanjutnya menurut Nurkolis (1996: 12) bahwa “ Konsep sekolah unggulan memfokuskan pada adanya peningkatan kinerja secara terus menerus dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh”. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuhkembangkan melainkan potensi psikis, fisik, etik, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi. Sedangkan menurut Hasan (1996: 35) mengatakan bahwa: “Sekolah unggulan dapat diartikan sekolah yang mengolah suatu proses pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia unggul”.

Sekolah unggulan merupakan sekolah yang mampu memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal dengan mengupayakan penerapan standar pelayanan pendidikan dan mengembangkan budaya lokal sekolah yang mampu mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang baik sehingga mampu mendorong

keberhasilan proses pendidikan secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Tidak sedikit sekolah dikatakan unggul namun tidak memenuhi kualifikasi keunggulan seperti yang diharapkan. Berdasarkan pendapat penulis, Yayasan Darul Hikam Bandung sebagai salah satu yayasan yang mampu memberikan pelayanan pendidikan secara optimal dapat dijadikan salah satu pilihan sekolah unggul yang mampu memenuhi harapan stakeholders pendidikan dalam menciptakan generasi handal yang dapat memenuhi tantangan global dan berdaya saing tinggi.

SMP Darul Hikam Bandung sebagai salah-satu sekolah unggulan dapat dibuktikan dengan tingginya daya minat masyarakat yang sangat tinggi dengan rasio perbandingan 1: 2, kapasitas rombongan belajar hanya 2 rombel dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas belajar mengajar, out put lulusan 100% serta prestasi lainnya yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peserta didik secara maksimal.

Dengan dasar di atas penulis berpendapat bahwa kualitas SMP Darul Hikam Bandung perlu di evaluasi dan dikaji lebih dalam supaya dapat mengidentifikasi kunci kesuksesan dari perencanaan, implementasi serta efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikannya. Dengan tujuan akhir hasil evaluasi dan pengkajian ini dapat dijadikan dan dijadikan rujukan bagi penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan baik pada ruang lingkup persekolahan maupun pengambil kebijakan.

Untuk mengetahui sejauh mana standar pelayanan pendidikan di sekolah unggulan maka perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk penelitian yang mendalam. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian, dengan judul: "*Evaluasi Standar Pelayanan Pendidikan Di Sekolah Unggulan (Studi Kasus di SMP Darul Hikam Bandung)*".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di sini pada hakekatnya adalah generalisasi deskripsi rumusan ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya (Mohammad Ali, 1987: 36). Dengan demikian, rumusan masalah dapat memberikan penegasan akan batasan, spesifikasi serta lebih memperjelas masalah yang di teliti sehingga pembahasan mengarah kepada pemecahan masalah yang diinginkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana standar pelayanan pendidikan di SMP Darul Hikam Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penentu keberhasilan standar pelayanan pendidikan SMP Darul Hikam Bandung?
3. Bagaimana upaya meningkatkan efektivitas standar pelayanan pendidikan di SMP Darul Hikam Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang standar pelayanan pendidikan di sekolah unggulan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran manajemen sekolah unggulan di SMP Darul Hikam Bandung;
- b. Untuk mengetahui gambaran peningkatan mutu pendidikan di SMP Darul Hikam Bandung;
- c. Untuk mengetahui dan mengevaluasi standar pelayanan pendidikan di sekolah unggulan (Studi Kasus di SMP Darul Hikam Bandung).

D. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dikemukakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang terdapat pada penelitian ini. Uraian penjelasan istilah pada judul penelitian ini terdiri atas:

1. Evaluasi

Evaluasi menurut Suharsimi Arikunto (2004: 1) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, evaluasi sebagaimana dikatakan Gronlund (1990: 5) merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran

telah dicapai oleh siswa. Menurut Djemari Mardapi (2004: 19) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Pendapat lain dikemukakan Ralph Tyler (1950), evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan tercapai. Sementara Cronbach & Stufflebeam mengemukakan bahwa evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

2. Standar pelayanan pendidikan

Standar pelayanan pendidikan merupakan kriteria minimal tentang layanan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar layanan pendidikan diharapkan mampu memberikan arah dan koridor pelaksanaan bagi para penyelenggara pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional mampu diupayakan dengan dukungan seluruh jajaran pelaksana dan penyelenggara pendidikan. Disamping itu, bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar layanan pendidikan disusun secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kehidupan lokal, nasional dan global.

3. Sekolah unggulan

Sekolah unggulan adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. (Depdikbud, 1994: 3). Selanjutnya menurut Nurkolis (1996: 12) bahwa “ Konsep sekolah unggulan

memfokuskan pada adanya peningkatan kinerja secara terus menerus dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh”. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuhkembangkan melainkan potensi psikis, fisik, etik, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi. Sedangkan menurut Hasan (1996: 35) mengatakan bahwa: “Sekolah unggulan dapat diartikan sekolah yang mengolah suatu proses pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia unggul”.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. BAB I merupakan bab pendahuluan, di dalamnya terdiri dari antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Adapun landasan teori dipaparkan dalam BAB II. Didalamnya terdiri dari antara lain, pertama tinjauan mengenai evaluasi program yang terdiri dari konsep evaluasi, tujuan evaluasi, model-model evaluasi dan proses evaluasi.

Kedua, tinjauan mengenai standar pendidikan yaitu konsep standar pendidikan dan ruang lingkup standar pendidikan. Ketiga, tinjauan mengenai pengelolaan satuan pendidikan yang terdiri dari pengertian pengelolaan sekolah, fungsi pengelolaan sekolah, prinsip-prinsip pengelolaan sekolah, garapan pengelolaan sekolah. Keempat tinjauan mengenai sekolah unggulan yang terdiri dari: pengertian sekolah unggulan, latar belakang sekolah unggulan, karakteristik

sekolah unggulan, filosofi sekolah unggulan, visi misi sekolah unggulan, nilai-nilai pada sekolah unggulan, dan tipe-tipe sekolah unggulan.

BAB III memaparkan tentang definisi operasional, metode penelitian, sumber data, lokasi dan partisipan penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Bab selanjutnya BAB IV merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang laporan hasil penelitian, terdiri atas hal-hal yang menyangkut deskripsi obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian.

Bab terakhir yaitu BAB V merupakan bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian kemudian implikasi dari hasil pembahasan yang dilanjutkan dengan rekomendasi.

